ABSTRAK

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa mengikuti perkembangan teknologi khususnya dalam penggunaan uang non tunai dalam seluruh administrasi pemerintahanya, dikenal Transaksi Non Tunai. Khususnya Transaksi Non Tunai yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran,di OPD/ UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari deskripsi singkat di atas maka penulis mengambil judul **“** ***IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DI KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA* ”** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Transaksi Non Tunai Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Kecamatan Pasar Rebo, faktor-faktor yang menghambat serta upaya yang dilakukan Kecamatan Pasar Rebo dalam mengatasi hambatan.

Penulis menggunakan teori implementasi oleh Edward III dengan 4 dimensi yankni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi serta Struktur Birokrasi dan sebagai pedoman Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Transaksi Non Tunai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data/informasi dilakukan dengan teknik wawancara sebagai instrument utama, kemudian dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, display data serta verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Transaksi Non Tunai Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Kecamatan Pasar Rebo sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari prespektif normatif dan prespektif teoritis pada dimensi Komunikasi, Disposisi serta Struktur Birokrasi hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa wawancara dengan aparatur Kecamatan Pasar Rebo.

Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa kendala yaitu pada prespektif normatif adanya Perbedaan bank yang dimiliki rekanan atau pihak ke-3, selain itu pada prespektif teoritis hambatan muncul pada dimensi Sumber Daya yakni adanya Biaya Administrasi dan Cek/BG yang masih belum dianggarkan pada tahun 2016 dan Server sistem Transaksi Non Tunai masih belum stabil. Sedangkan, upaya yang dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik dengan rekanan atau pihak ke-3, menganggarkan pembelian Cek/BG mulai tahun anggaran 2017 dan perbaikan server oleh bank DKI.

*ABSTRACT*

*DKI Jakarta Provincial Government always  technological progress, especially in the use of non-cash money in all government administration, known as Non-Cash Transaction. Particularly Non-Cash Transactions in the Budget Implementation Document, at OPD / UKPD DKI Jakarta Provincial Government, from the above description of the authors entitled* ***"IMPLEMENTATION OF NON CASH TRANSACTION DOCUMENT IMPLEMENTATION OF BUDGET AT PASAR REBO DISTRICT EAST JAKARTA CITY OF ADMINISTRATION DKI JAKARTA PROVINCE*** *" This is objectives to find out how the implementation of Non-Cash Transactions in Pasar Rebo, the inhibiting factors and efforts undertaken in Pasar Rebo in overcoming obstacles.*

*The author uses the theory of implementation by Edward III with 4 dimensions its Communications, Resources, Disposition and Bureaucracy Structure and as a guideline of the Governor Regulation No. 33 of 2016 About Non-Cash Transactions. This research is done by using qualitative approach. Data / information collection is done by interview technique as main instrument, then completed with documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, conclusion, display data and verification.*

*The result of research shows that Implementation of Non-Cash Transaction in Pasar Rebo has been running well, compared with normative perspective and theoretical perspective on Communication, Disposition and Bureaucracy Structure dimension can be proved from several interviews with Market Rebo District apparatus.*

*In the execution are some things that are done under normal conditions different from banks created from 3rd parties, in addition to the different circumstances in the dimensions of existing Resources. Administration and Check / BG which have not been budgeted in 2016 and Non-Cash Transaction System server is still not stable. While, the effort of Pasar Rebo district to overcome the obstacle is through coordination with the patner and third party, budgeted the purchase of transfer form start from 2017, server improvement did by DKI bank.*